

PENGARUH *MONEY POLITICS CULTURE* TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM

Mahrta Apriyani¹, Fitriatul Awaliyah², Maria Amandit³, Mayda Prastiwi⁴, Muhammad Agus Humaidi⁵

Email: mahrta.apriyani@gmail.com, firtiatul.awaliyah@gmail.com, maria.amandit35@gmail.com,
prastiwi_mayda@yahoo.co.id, m.agus.humaidi@gmail.com

^{1,2,3,4}Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Islam Kalimantan MAB

⁵FISIP Universitas Islam Kalimantan MAB

ABSTRAK

Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dapat diartikan sebagai penerimaan masyarakat atas penerapan sistem demokrasi di Indonesia namun tingginya partisipasi masyarakat tidak terlepas dari peranan *stick holder* setempat, akan tetapi tanpa *Money Politics* masyarakat akan enggan untuk memilih. bagi masyarakat *Money Politics* ibarat sebagai bisnis rutin pada masa pemilihan umum yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh *Money Politics Culture* terhadap partisipasi politik Masyarakat dalam pemilihan umum. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah melalui studi literatur dan di analisis menggunakan teknik Analisis isi (Content Analysis). Hasil studi menunjukkan bahwa *Money Politics* di Indonesia telah menjadi budaya yang akan terjadi terus menerus setiap diadakannya pemilihan umum dan *Money Politics* menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat di Indonesia.

Kata kunci: *Money Politics Culture*; Partisipasi Politik

PENDAHULUAN

Pemilihan umum berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Pasal 1 (Indonesia) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dalam pemilihan umum di Indonesia partisipasi masyarakat merupakan salah satu wujud tanggung jawab sebagai warga Negara. Berdasarkan laporan hasil penelitian yang dilakukan Komisi

Pemilihan Umum (KPU) bahwa pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih anggota DPR, DPD dan DPRD sejak era reformasi Indonesia angka partisipasi masyarakat cukup tinggi (Rahmawati, et.al, 2016: 16).

Tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dapat diartikan sebagai penerimaan masyarakat atas penerapan sistem demokrasi di Indonesia namun tingginya partisipasi masyarakat tidak terlepas dari peranan *stick holder* setempat, walaupun seorang kandidat atau calon legislatif sudah menunjukkan dedikasinya sebagai calon wakil rakyat dengan cara sosialisasi akan tetapi tanpa *Money Politics* masyarakat akan enggan untuk

MUTAKALLIMIN; Jurnal Ilmu Komunikasi
Vol 5 No 2 Tahun 2022

memilihnya. Menurut Siti Rubiah, et.al (2019) bagi masyarakat *Money Politics* ibarat sebagai bisnis rutin pada masa pemilihan umum yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan.

Menurut Afan Gaffar dalam Sabilal, *Money Politics* merupakan tindakan membagi-bagi uang baik sebagai pemilik partai atau pribadi untuk membeli suara, sedangkan menurut Yusril mengatakan bahwa *Money Politics* merupakan tindakan untuk mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan. Imbalan dalam bentuk uang merupakan faktor penting yang digunakan untuk mendongkrak charisma seseorang melalui pencitraan sekaligus untuk mengendalikan wacana strategis terkait dengan kepentingan sebuah politik dan kekuasaan. Karena pada dasarnya politik adalah sebuah seni, sehingga seseorang memiliki kebebasan untuk mempengaruhi dan memaksakan kepentingan perseorangan atau kelompok pada pihak lain melalui berbagai macam sarana termasuk uang (Sabilal, 2021: 2).

Secara sadar atau tidak fenomena *Money Politics* sudah merajalela dan bahkan sudah menjadi budaya di kalangan masyarakat Indonesia menjelang pemilihan umum. Menurut M. Harris dalam Sofyan menyatakan bahwa budaya

merupakan suatu tradisi dan gaya hidup yang dipelajari yang didapatkan secara sosial dalam suatu masyarakat, seperti cara berpikir, perasaan dan tindakannya menjadi berpola atau dilakukan secara berulang-ulang (Sofyan, 2021: 2). Masyarakat menganggap pemberian uang oleh kandidat merupakan suatu hal yang wajar, karena *Money Politics* ini sudah dilakukan berulang kali sehingga persentase *Money Politics* terus meningkat dewasa ini (Chusnul, 2020: 99).

Berdasarkan hasil penelitian dari Dian Amalia (2020) jumlah pemilihan umum pada tahun 2018 sangat bertambah atau meningkat, banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam mengikuti pemilihan umum. Dan berdasarkan penelitiannya *Money Politics* memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Dengan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “Pengaruh *Money Politics Culture* terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum di Indonesia”.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan studi literatur. Metode studi literatur yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah

MUTAKALLIMIN; Jurnal Ilmu Komunikasi
Vol 5 No 2 Tahun 2022

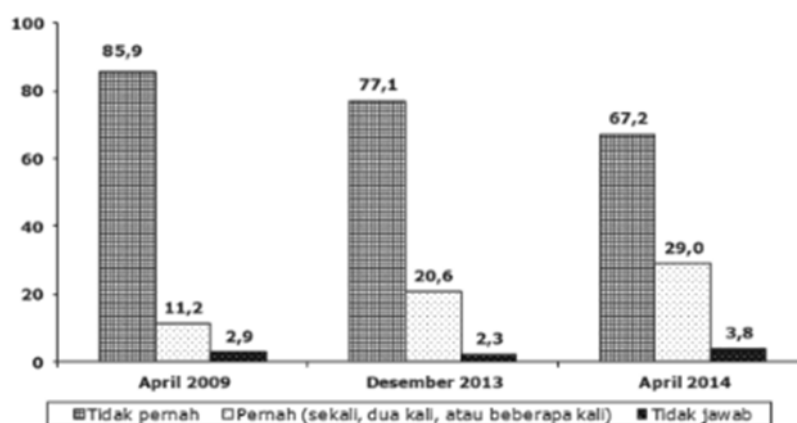
bahan penelitian (Kartiningih, 2015: 24).

Kartiningih menambahkan bahwa tujuan utama studi kepustakaan dilakukan setiap peneliti yaitu untuk mencari dasar pijakan/fondasi agar memperoleh dan dapat membangun landasan teori, kerangka berpikir dan menentukan dugaan sementara (hipotesis) penelitian. Analisa data digunakan teknik Analisis isi (*Content Analysis*) yang merupakan penelitian yang bersifat mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa (Afifuddin, 2012: 165).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh *Money Politics Culture* terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu di Indonesia

Problematika *Money Politics* yang muncul di Indonesia sudah menjadi sebuah budaya dan mengakar disetiap pemilihan umum. Masyarakat menganggap pemberian uang yang diberikan oleh kandidat merupakan suatu hal yang biasa, karena *Money Politics* ini sudah dilakukan berulang kali, sehingga persentase *Money Politics* terus meningkat dewasa ini (Chusnul, 2020: 100). *Money Politics* pada tahun 2009 s.d. 2014 mengalami peningkatan tajam. Berikut ini merupakan survei mengenai politik uang pada individu dan warga pada pemilihan Legislatif berdasarkan dari survei LSI (Burhanudin, 2020: 62).



Gambar 1. Kenaikan Tingkat Politik Uang, 2009 – 2014 (%)

Berdasarkan grafik hasil survei LSI tersebut dapat diketahui bahwa pemilihan umum Legislatif 2009 tingkat *Money Politics* hanya 11,2 % responden yang

mengaku menjadi target pembelian suara. Insiden tersebut meningkat pada Desember 2013 (beberapa bulan sebelum pemilihan umum Legislatif 2014), menjadi 20,6%

MUTAKALLIMIN; Jurnal Ilmu Komunikasi
Vol 5 No 2 Tahun 2022

dan pada April 2014 terus mengalami peningkatan *Money Politics* menjadi 29%. Dari hasil survei LSI tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa *Money Politics* terus terjadi pada masa pemilihan umum di Indonesia setiap lima tahunnya. Sehingga dapat diasumsikan *Money Politics* di Indonesia telah menjadi budaya yang akan terjadi terus menerus setiap diadakannya pemilihan umum di Indonesia.

Menurut penelitian Merry (2019) didapatkan hasil bahwa terdapat pengaruh antara *Money Politics* terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat, jadi semakin tinggi / kuat *Money Politics* maka semakin tinggi juga tingkat partisipasi politik masyarakat. Selain itu berdasarkan hasil penelitian dari Siti Rubiah, et al. (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara praktik *Money Politics* terhadap partisipasi politik masyarakat ini memberikan pengertian bahwa semakin tinggi praktik *Money Politics* yang terjadi dimasyarakat maka semakin tinggi pula partisipasi politik masyarakat tersebut. Demikian pula sebaliknya semakin rendah praktik *Money Politics* yang terjadi dimasyarakat semakin rendah pula partisipasi politik masyarakat tersebut. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa *Money Politics* menjadi salah satu faktor yang sangat

mempengaruhi tingkat partisipasi politik setiap lapisan masyarakat kalangan bawah sampai kalangan atas.

Dilansir pada Detik News *Money Politics* merupakan pelanggaran paling banyak di pemilihan legislatif tahun 2014, hampir 52% pelanggaran *Money Politics* yang disorot media massa dengan 1.716 ekspos pemberitaan (Zal, 2014). Berita Bawaslu Kabupaten Berau juga menyatakan bahwa *Money Politics* sudah menjadi budaya rakyat Indonesia yang akan menghancurkan demokrasi secara substansial (Izzatullah, 2021). Berdasarkan kajian literatur dari buku, penelitian terdahulu dan berita yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik *Money Politics Culture* sudah tertanam kuat pada opini masyarakat sehingga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum di Indonesia.

PENUTUP

Berdasarkan hasil survei LSI persentase *Money Politics* pada tahun 2009 s.d 2014 selalu mengalami peningkatan, itu dapat diasumsikan bahwa *Money Politics* di Indonesia telah menjadi budaya yang akan terjadi terus menerus setiap diadakannya pemilihan umum. Berdasarkan hasil

MUTAKALLIMIN; Jurnal Ilmu Komunikasi
Vol 5 No 2 Tahun 2022

beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa *Money Politics* menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat di Indonesia dan praktik *Money Politics* dewasa ini

sudah tertanam kuat pada opini masyarakat sehingga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat di Indonesia.

REFERENSI

Buku

- Afifuddin. (2012). *Metodologi Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Burhanudin. (2020). *Kuasa Uang Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Kartiningsih, E. D. (2015). *Panduan Penyusunan Studi Literatur*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit Mojokerto.
- Sabilal. (2021). *Praktik Money Politics dalam Perspektif Sosio Legal Normatif*. PT. Nasya Expanding Management.
- Sofyan. (2021). *Argumen Islam Ramah Budaya*. Intelegensia Media.

Jurnal

- Chusnul Q. N. P & Nur B. U. (2020). Budaya Money Politics dan Identity Politics dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Legislatif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(1). <https://doi.org/10.20956/jl.v4i1.12323>
- Dian Amalia. (2020). Pengaruh “Money Politics” Terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Pada Tahun 2018 di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar*.

https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/10530-Full_Text.pdf

- Mery A. (2019). Pengaruh Politik Uang terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Dharmasra pada Pilkada Serentak 2015. *Jurnal Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat*. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/view/1556/1355>
- Siti Rubiah & Rahayu. (2019). Pengaruh Pola Pikir Masyarakat dan Praktik Money Politik terhadap Partisipasi Politik. *Jurnal Pendidikan Volume 14*. <https://sintesa.stkip-arahmaniyah.ac.id/index.php/sintesa/article/view/2/3>

Undang-Undang

- Undang-Undang RI UU No. 17 Pasal 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Indonesia). Diakses tanggal 29 Oktober 2022 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37644/uu-no-7-tahun-2017>.

Website

- Zal. (2014). *Money Politics pelanggaran paling banyak di Pileg 2014*. Detiknews.Com. <https://news.detik.com/berita/d-2579488/money-politics-pelanggaran-paling-banyak-di-pileg-2014>
- Izzatullah. (2021). *Menjadi Budaya Rakyat Indonesia, Money Politics menghancurkan demokrasi secara substansial*. <https://berau.bawaslu.go.id/berita/prev>

Mahrita Apriyani, Fitriatul Awaliyah, Maria Amandit
Mayda Prastiwi, Muhammad Agus Humaidi

E-ISSN : 2686-178X

MUTAKALLIMIN; Jurnal Ilmu Komunikasi
Vol 5 No 2 Tahun 2022

iew/menjadi-budaya-rakyat-
indonesia-money-politic-

menghancurkan-demokrasi-secara-
subtsnsial